

**RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2022**



SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II

KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
- c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
- d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
- e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
- f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
- j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
- l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
- m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
- n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
- o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
- q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
- r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
- s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
- v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
- w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
- x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
- y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
- z. Kecamatan Klaten Utara;
- aa. Kecamatan Klaten Tengah;
- bb. Kecamatan Klaten Selatan;
- cc. Kecamatan Kalikotes;
- dd. Kecamatan Ngawen;
- ee. Kecamatan Kebonarum;
- ff. Kecamatan Wedi;
- gg. Kecamatan Jogonalan;
- hh. Kecamatan Gantiwarno;
- ii. Kecamatan Prambanan;
- jj. Kecamatan Manisrenggo;
- kk. Kecamatan Kemalang;
- ll. Kecamatan Karangnongko;
- mm. Kecamatan Jatinom;
- nn. Kecamatan Karanganom;
- oo. Kecamatan Tulung;
- pp. Kecamatan Polanharjo;
- qq. Kecamatan Delanggu;
- rr. Kecamatan Juwiring;
- ss. Kecamatan Wonosari;
- tt. Kecamatan Ceper;
- uu. Kecamatan Pedan;
- vv. Kecamatan Karangdowo;
- ww. Kecamatan Cawas;
- xx. Kecamatan Trucuk; dan
- yy. Kecamatan Bayat;

- (3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
Ttd
Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
I. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12
2.4 Review Terhadap Rencana Kerja RKPD.....	14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	21
III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	23
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	25
3.3 Program dan Kegiatan	26
IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	28
V. Penutup.....	29

Lampiran

- 1... Pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten
(Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d
Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022
- 2... Rencana Program Dan Kegiatan SPKD Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Proses orientasi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika diperlukan dalam membentuk kesamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai dokumen yang mendasari penyusunan Rencana Kerja OPD. Dokumen

yang perlu dipahami bersama antara lain yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020 - 2025, Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten 2022. Selanjutnya, setiap Subkoordinator menyusun rancangan Rencana Kerja untuk tahun anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing beserta anggaran yang diperlukan. Hasil rancangan Rencana Kerja dari tiap-tiap Subkoordinator kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten Tahun 2023 guna memenuhi kebutuhan terhadap suatu rencana pembangunan tahunan Tahun 2023, memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pelaksana teknis dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan untuk periode satu tahun anggaran pada tahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- e. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja OPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renstra Dinas Komunikasi Informatika 2016 – 2021 tahun kelima (2021) pada umumnya dituangkan selaras dengan program dan kegiatan pada Renja Dinas Komunikasi Informatika Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan tahun yang lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis tahun kelima ini digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Hasil evaluasi program dan kegiatan Renja Tahun 2021 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal. Program dan kegiatan Renja Tahun 2022 belum selesai dilaksanakan, namun berikut terdapat perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renja Tahun 2022. Secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika Tahun 2021 dan perkiraan realisasi capaian target/program Renja Tahun 2022 diuraikan pada tabel 3.3 Sedangkan secara singkat hasil kegiatan tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pencapaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah dalam menunjang kinerja Dinas Komunikasi Informatika secara keseluruhan.

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan ini memiliki Subkegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Pencapaian kinerja subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021, realisasi fisik kegiatan tercapai 100%, dan realisasi keuangan terealisasi sebesar 97% dari anggaran.

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 subkegiatan yaitu;

1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Subkegiatan ini dapat dinilai capaian kinerjanya melalui terbayarnya gaji dan tunjangan ASN di Dinas Komunikasi Informatika Tahun 2021. Tahun 2021 seluruh hak ASN Dinas Komunikasi Informatika telah terbayarkan gaji dan tunjangannya 100%.

2) Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN merupakan subkegiatan yang menyediakan perjalanan dinas dalam daerah bagi ASN dan Non ASN yang melaksanakan tugas sesuai perintah atasan langsung. Sub kegiatan ini pada tahun 2021 tidak dapat terealisasi sebesar target karena adanya perubahan Peraturan Bupati terkait Perjalanan Dinas yang merubah beberapa syarat sehingga anggaran ini dapat di efisiensi. Capaian kinerja subkegiatan ini sebesar 91%

c) **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Kegiatan ini bersumber dana DBHCHT yang digunakan untuk Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. Pencapaian kinerja subkegiatan ini adalah tersosialisasinya peraturan perundang-undangan terkait cukai rokok di seluruh wilayah Kabupaten Klaten. Kegiatan ini terlaksana secara fisik sebesar 93% dan realisasi keuangan sebesar 90%.

d) **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) subkegiatan diantaranya adalah sebagai berikut;

1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan

Kegiatan ini menyerap anggaran sebanyak 74% karena komponen listrik di Kantor Dinas Kominfo masih banyak yang berfungsi dengan baik dan belum banyak memerlukan pergantian.

2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor

Penyediaan ATK dan perlengkapan *ID Card* karyawan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten merupakan anggaran terbesar dari kegiatan ini yang menyerap anggaran sebesar 98%.

3) Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan ini meliputi pengadaan hand sanitizer, dan peralatan kebersihan untuk memastikan kondisi kantor kominfo tetap bersih dan aman bagi para karyawan dan tamu yang berkunjung. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 93%.

4) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Barang cetakan dan penggandaan di Dinas Kominfo pada tahun 2021 terealisasi hampir 100% karena pada perubahan anggaran tahun 2021 seluruh sisa alokasi belanja cetak di *refocusing* untuk penanganan covid 19 di Kabupaten Klaten.

5) Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyerap anggaran sebesar 89% untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan bagi karyawan Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten.

6) Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Masa pandemi covid 19 membatasi adanya pertemuan tatap muka yang melibatkan kerumunan untuk mencegah semakin banyaknya jumlah penduduk yang terpapar covid 19, sehingga kebijakan pertemuan daring mengurangi jumlah realisasi belanja makan dan minum tamu.

7) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini menyerap hampir 99% anggaran karena perhitungan yang tepat terkait kebutuhan penyelenggaraan rapat yang masih dibatasi dengan mekanisme daring.

e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Subkegiatan Pengadaan Mebel

Kegiatan ini dapat terlaksana sesuai target dan rencana pengadaan dengan capaian sebesar 98% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 2%.

2) Subkegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Kantor Atau Bangunan Lainnya.

Pengadaan sarana dan prasarana di Dinas Kominfo tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian 98% dari alokasi anggaran yang diberikan.

f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Seiring meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana pengiriman surat maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran untuk kegiatan surat menyurat. Kegiatan ini terealisasi sebesar 75%.

2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan ini mengakomodir pembayaran tenaga harian lepas untuk administrasi di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten. Tahun 2021 kegiatan ini terealisasi sebesar 97%.

g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan

Pencapaian kinerja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

selama 1 (satu) tahun. Anggaran pemeliharaan kendaraan dinas/operasional ini terserap 95%.

- 2) Subkegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terealisasi sebesar 99% untuk memelihara atap gedung Dinas Kominfo yang bocor.
- 3) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Atau Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.

Pencapaian kinerja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor adalah terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga selama 1 (satu) tahun. Tahun 2021 anggaran ini terserap sebanyak 96%

B. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota dengan 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Subkegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik. Kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik terealisasi sebesar 92% untuk dokumen perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi.
- 2) Subkegiatan Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik. Kegiatan monitoring opini dan aspirasi publik terealisasi sebesar 70% untuk aduan masyarakat yang tertangani.
- 3) Subkegiatan Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik. Pencapaian kinerja kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik adalah pemeringkatan keterbukaan publik terhadap badan publik yang terealisasi sebesar 96%.
- 4) Subkegiatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan. Pencapaian kinerja kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan adalah menara yang teratribusi, warnet terdata, dokumen set audit menara, terlaksananya kegiatan ORARI, dan terlaksananya kegiatan RAPI yang terealisasi sebesar 100%.
- 5) Subkegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik. Kegiatan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik sebesar 93% untuk SDM bidang komunikasi dan informasi.
- 6) Subkegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas. Pencapaian kinerja kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas adalah informasi yang disebarluaskan dan KIM di tingkat kecamatan yang terealisasi sebesar 93%.

- 7) Subkegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar 96% untuk peralatan komunikasi dan informasi terpelihara di kabupaten klaten.

C. Program Aplikasi Informatika

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

- a) **Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini memiliki 1 (satu) subkegiatan yaitu Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah. Pencapaian kinerja subkegiatan penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah adalah lokasi pengembangan jaringan komunikasi dan informasi yang terealisasi sebesar 99%.

- b) **Pengelolaan E – Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini memiliki 1 (satu) subkegiatan yaitu Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pencapaian kinerja subkegiatan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik adalah website dan sistem yang terealisasi keuangan sebesar 93%.

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dan 1 (satu) subkegiatan yaitu Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. Pencapaian kinerja subkegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral adalah dokumen data dan statistik daerah tersusun yang terealisasi keuangan sebesar 87%.

E. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan 2 (dua) subkegiatan yaitu:

- 1) Subkegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik. Pencapaian kinerja kegiatan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik adalah sosialisasi informasi yang kerkualifikasi sandi dengan realisasi keuangan sebesar 98%.
- 2) Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota yang terealisasi

keuangan sebesar 98% digunakan untuk dokumen yang berisi informasi berkualifikasi sandi

Program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan hampir seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai target berkat koordinasi dan komunikasi yang secara rutin dilakukan di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten. Strategi lain yang diambil antara lain meningkatkan koordinasi lintas sektor dan evaluasi berkala terhadap realisasi kegiatan dan dengan segera mengambil langkah-langkah solusi untuk mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan. Desk internal Dinas Komunikasi Informatika dilakukan juga untuk memastikan seluruh rencana kegiatan sudah dipersiapkan dengan matang dengan segala pertimbangan dan faktor resiko yang menyertainya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, membutuhkan infrastruktur yang handal khususnya sinyal yang kuat di Kabupaten Klaten melalui penyediaan menara telekomunikasi seluler. Dalam upaya mencapai target cakupan layanan komunikasi di Kabupaten Klaten maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten memberikan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya menara telekomunikasi yang berfungsi untuk meningkatkan sinyal guna mendukung kemudahan mendapatkan informasi sehingga tidak ada lagi wilayah *blankspot* di Kabupaten Klaten. Dengan demikian masyarakat dapat memahami dan mengerti bahwa layanan menara telekomunikasi sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu untuk cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan dan desa belum tercapai target tahun ini karena kondisi pandemi Covid 19 yang belum reda. Namun demikian terdapat satu kebijakan dari pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan lomba Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Kemitraan dengan kecamatan untuk percepatan pembuatan KIM, sehingga tahun 2022 ini target pembentukan KIM akan segera direalisasikan.

Persentase pelayanan publik dan non publik berbasis e-government juga merupakan salah satu indikator kinerja keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten. Tahun 2021 capaian kinerja mencapai 100% walaupun ditemukan faktor penghambat yaitu penyediaan sarana dan prasarana belum optimal dan terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM teknis. Namun demikian terdapat faktor pendorong keberhasilan yaitu telah tersedianya dokumen arsitektur SPBE dan kebijakan lainnya (perbup *smart city*) yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait SPBE bahwa sampai dengan tahun 2021 Dinas Komunikasi Informatika belum melaksanakan Audit TIK dari pelaksanaan audit infrastruktur SPBE, pelaksanaan audit aplikasi SPBE, dan pelaksanaan audit keamanan SPBE, sehingga target pelaksanaan Audit TIK menjadi prioritas Tahun 2023.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik tercapai skor 89 dari target 70 sehingga capaian kinerja sebesar 127%. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah. Layanan informasi melalui lembaga Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Kabupaten Klaten menempati 10 besar dengan kategori “Menuju Informatif”. Berikut ini rincian capaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika yang termuat dalam tabel 2.2

Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika
Provinsi/Kabupaten/Kota: Jawa Tengah/Klaten/Klaten**

NO	Indikator	SPM / Standar Nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proye ksi	Catatan Analisis
				Tah un 202 1 (thn n-2)	Tah un 2022 (thn n-1)	Tahu n 2023 (thn n)	Tah un 202 4 (thn n+1)	Tahu n 2021 (thn n-2)	Tah un 2022 (thn n-1)	Tahu n 2023 (thn n)	Tahu n 2024 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	12	13
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	-	-	56,5	59,5	63		67,6	32			
2	Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	-	-	-	75	77		-	0			
3	Tingkat Keamanan Informasi	-	-	-	60	68		-	58			
4	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	-	-	-	30	40		-	5			

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Perangkat Daerah

Dinamika pemerintahan yang berkembang tidak menutup kemungkinan munculnya kondisi komunikasi krisis yang mengancam reputasi atau mengganggu jalannya pemerintahan. Mengatasi hal tersebut pelaku komunikasi publik pemerintah harus bisa mempersiapkan skenario manajemen krisis yang terlatih, didukung kordinasi antar lembaga yang baik, penyiapan data yang akurat dan narasi tunggal yang efektif. Hal itu juga perlu didukung pemanfaatan plaform media komunikasi pemerintah yang efektif didukung komunitas informasi yang bisa membantu komunikasi pemerintah.

Partisipasi masyarakat salah satunya didukung dari fungsi kontrol masyarakat melalui pengaduan. Kanal ini bisa menjadi pintu masuk atas permasalahan yang ada, apabila disikapi dengan tindak-lanjut penanganan masalah dengan intervensi yang tepat. Oleh karena itu efektifitas kinerja tim pengaduan perlu didukung kebijakan publik dan pemihakan yang memadai. Pengaduan yang tidak terkelola dengan baik bisa menyebabkan reputasi dan

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah menurun. Terkait dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten berusaha untuk memberikan peningkatan kualitas pelayanan dalam meneruskan pengaduan masyarakat kepada OPD yang bertanggung jawab terhadap laporan tersebut, sehingga masyarakat merasa mendapat perhatian dan jawaban atas pengaduan yang disampaikan.

Indeks keterbukaan informasi menjadi indikator kinerja utama Bupati Klaten selaku kepala daerah. Isu keterbukaan informasi akan selalu muncul seiring penilaian kepatuhan badan publik oleh Komisi Informasi. Di sisi lain, ketidakpahaman badan publik terhadap mekanisme dan standard layanan informasi akan menyebabkan badan publik banyak tersandung masalah sengketa informasi. Menyikapi hal tersebut perlu dilakukan peningkatan koordinasi antar OPD dalam melaksanakan Implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga Kabupaten Klaten mampu mempertahankan prestasinya dalam keterbukaan Informasi Publik baik di tingkat regional maupun nasional

SPBE di pemerintah Kabupaten Klaten mengalami penurunan nilai indeks SPBE dari 3,00 pada tahun 2020 menjadi 2,74 pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan bertambahnya dimensi, aspek dan indikator penilaian. Kedepannya untuk meningkatkan nilai indeks SPBE perlu dilakukan koordinasi dengan PD terkait yang nilai indikator indeks SPBE masih rendah atau nilai indikator indeks SPBE nya masih dapat ditingkatkan. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian indeks di Kabupaten Klaten antara lain belum dilaksanakannya audit TIK dari pelaksanaan audit infrastruktur SPBE, pelaksanaan audit aplikasi SPBE, dan pelaksanaan audit keamanan SPBE. Solusi yang akan diambil yaitu membuat dokumentasi audit mengenai penerapan tata kelola, infrastruktur, kinerja infrastruktur yang direncanakan dalam audit internal yang berkesinambungan terencana dan terarah sebagai program kerja yang selaras dengan peta rencana.

Dalam rangka menindaklanjuti program SPBE, kebutuhan sistem elektronik semakin meningkat sehingga permintaan pembangunan/pengembangan sistem elektronik oleh Perangkat Daerah untuk mendukung implementasi pelayanan publik secara elektronik semakin bertambah. Sedangkan *resource* sumber daya manusia di Dinas Komunikasi dan Informatika sangat terbatas dalam hal kuantitas dan kualitas, oleh karena itu rekrutmen SDM kompeten dan pelatihan SDM merupakan sesuatu hal yang mendesak agar mempercepat proses implementasi SPBE khususnya di sektor pelayanan Publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten sampai saat ini belum memiliki Disaster Recovery Center (DRC). Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengajukan alokasi anggaran untuk hal tersebut pada Tahun 2020, akan tetapi karena alokasi anggaran dilakukan rasionalisasi terkait pandemi virus Covid19 maka tidak dapat terealisasi. Tahun ini, Dinas Komunikasi dan Informatika kembali menganggarkan 1 (satu) unit server yang difungsikan untuk DRC. Server sebanyak 1 unit tersebut belum mencukupi untuk

menghandling seluruh kebutuhan riil yang ada pada saat ini, sehingga akan dianggarkan kembali pada tahun 2023 mendatang.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk belanja internet sudah cukup memenuhi kebutuhan *bandwith* untuk aplikasi, daring, OPD dan server. Kebutuhan internet di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya penggunaan sistem elektronik yang dikelola oleh Diskominfo pada pusat data, sehingga anggaran belanja internet perlu adanya penambahan.

Kondisi existing infrastruktur jaringan komunikasi dan data saat ini, terdapat 23 titik kecamatan masih menggunakan media milik penyedia, sehingga masih adanya ketergantungan dari sisi konfigurasi dan kemudahan kontroling guna terwujudnya sistem jaringan intra pemerintah daerah yang merupakan amanat dari Permendagri 90.

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Review terhadap Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah adanya analisa terhadap kebutuhan yang disesuaikan dengan regulasi yang terus berkembang, sehingga perlu untuk memasukkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan seperti terlihat pada lampiran 2.4.

Tabel 2.4/Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023
Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan								
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.654.487.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.116.665.590	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					105.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					76.500.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	12 Dokumen	75.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	66.500.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen LKJP tersusun	4 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	5.000.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021		
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	4 Dokumen	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	5.000.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.815.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.203.316.137	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	27 Orang	3.675.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 Orang/bu	3.157.816.137	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021		
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPK SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerima	10 orang	100.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	24.900.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021		

Hasil Analisa Kebutuhan											
Rancangan Awal RKPD						Pagu Indikatif					
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Tersusun	18 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	15.500.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	2 Laporan	15.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	5.100.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
8	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Kegiatan	2.500.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10000 Orang	1.020.270.453	Penyesuaian dengan PMK 215/PMK.07/2021
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	15 Jenis	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 paket	38.500.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	15 Jenis	50.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	15 Paket	20.000.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	50 Kali	75.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	10 Laporan	39.750.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Kali	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 Laporan	87.749.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan								
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					324.487.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
13	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang diadakan	20 Unit	124.487.000	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket Mebel yang disediakan	2 Unit	91.900.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021	
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	30 Unit	200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	10 Unit	42.350.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					125.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Surat Terkirim	1500 Surat	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	12 Laporan	4.000.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	15.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	30.000.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021	
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	5 Orang	100.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	71.500.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					410.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	17 Unit	210.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	22 Unit	285.000.000	Adanya Penambahan kendaraan operasional RSPD dan Tim Liputan	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	2 Unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	44.980.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan							
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	20 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20 Unit	60.850.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021	
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.735.150.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					3.981.850.000
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1.735.150.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					3.981.850.000
21	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan Yang dirumuskan	3 Kebijakan	25.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	2 Dokumen	5.000.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021	
22	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aduan tertangani	105 Aduan	75.000.000	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	1 Dokumen	25.000.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021	
23	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemberitaan Daerah	260 berita	435.150.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	447.250.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021	
24	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah media yang dikelola	2 Media	250.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	346.000.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021	
25	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah badan publik kategori informatif	6 Badan Publik	75.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	2.525.000.000	Penambahan Anggaran dilakukan untuk keperluan branding Kabupaten Klaten di tingkat Nasional	
26	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 Organisasi	250.000.000	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 Dokumen	100.000.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
27	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah desa blank spot yang mendapat layanan telekomunikasi	50 Desa	225.000.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat kapasitasnya	50 Orang	133.600.000	Penyesuaian indikator berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021
28	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Informasi yang disebarluaskan melalui media massa dan papan ruang	180 Informasi	400.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	400.000.000	Penyesuaian indikator berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah daerah kabupaten/Kota					
29	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah OPD terlayani sistem jaringan intra Pemerintah Daerah Jumlah titik wifi di ruang publik terpasang	51 OPD 3 titik	3.818.563.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra pemerintah Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	69 Unit	3.380.343.410	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
30	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah OPD yang terintegrasi datanya dengan Sistem Pusat Data	11 OPD	50.000.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah Yang Dikelola	1 Unit	34.124.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021
31	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18 Layanan	450.000.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	12 Unit	397.106.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021
32	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi persiapan evaluasi penilaian smart city	8 Kegiatan	100.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	77.950.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan							
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting	
33	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	25 Orang	50.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	33.500.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				247.879.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					105.395.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				247.879.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					105.395.000	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				247.879.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					105.395.000	
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah data statistik sektoral	140 data	127.879.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik Sektoral	1 Dokumen	55.395.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021	
35	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produsen Data Statistik Sektoral	40 OPD	120.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	50 Orang	50.000.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				178.473.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					89.380.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				178.473.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					89.380.000	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				178.473.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					89.380.000	
36	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	510 Informasi	118.473.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	59.380.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021	
37	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6 Layanan	60.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	6 Perangkat Daerah	30.000.000	Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri 050-5889 Tahun 2021	
					14.284.552.000						13.216.314.0	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan terhadap program dan kegiatan dari masyarakat ditampung dalam suatu forum yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten pada awal tahun anggaran. Forum Perangkat Daerah ini diselenggarakan untuk menampung aspirasi dari seluruh *stakeholder* yang merupakan rangkaian penajaman Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya. Berikut adalah tanggapan dan saran yang diberikan oleh seluruh pemangku kepentingan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten.

NO	NAMA	TANGGAPAN DAN SARAN
1	Sutrisno	a. Apa yang sudah dirancang diharapkan penajaman substansi dan teknis b. Koreksi indikator c. Peningkatan informasi kepada masyarakat
2	Pandu Wirabangsa	a. Optimalisasi teknologi dan informasi b. Mempertajam Klaten Satu Data (persiapan infrastruktur data, bisa dimanfaatkan masyarakat dan klaten satu data harus menjadi fokus perhatian di tahun 2023) c. Aspek keuangan refocusing (melalui smartcity kominfo mendorong untuk penambahan inovasi di perangkat daerah). Dan diharapkan semua pihak organisasi perangkat daerah bisa melakukan inovasi dan bisa mendongkrak kinerja.
2	Joko Sarjono	a. Saran kinerja kominfo lebih berbobot dan berkualitas dalam penyebarluasan informasi publik b. Publik harus mendapatkan akses yang memadai c. Diskominfo sebagai juru bicara dan garda terdepan pemerintah perlu mempunyai kemampuan jurnalistik atau pers bukan hanya berita pidato d. Pranata komunikasi perlu merealisasikan sumber daya manusia menjadi lebih baik
3	Widowati	a. Kerjasama antara Diskominfo dengan PKK bisa terus berjalan dan tindak lanjut rakor PKK mendapatkan dukungan sarana dan prasarana b. Usulan yang dikirim melalui link diharapkan bisa diakomodir di tahun 2023

Beberapa hal yang disepakati berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah tersebut diantaranya adalah:

- 1) Mempertajam indikator serta target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- 2) Penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan.
- 3) Penyesuaian pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing – masing perangkat daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan disinkronkan dengan arah pembangunan daerah Kabupaten Klaten. Sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian target kegiatan.

Dalam mendukung pencapaian Tujuh Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024, Renstra 2020-2024 Kemenkominfo akan fokus untuk mendukung mewujudkan transformasi digital nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, transformasi digital nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai *supply*), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi *demand*).

Arah kebijakan yang diambil dalam percepatan transformasi digital nasional diantaranya adalah:

1. Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik. Strategi yang diambil meliputi:
 - a. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik;
 - b. Mempercepat digitalisasi penyiaran (*analog switch off*), untuk meraih digital dividend; dan
 - c. *Farming* dan *refarming* frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.
2. Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan dengan strategi yang diambil yaitu:
 - a. Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi next broadband (5G);
 - b. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional; dan
 - c. Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman.
3. Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital, dengan strategi:

- a. Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat; dan
- b. Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis.
4. Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan. Strategi yang diambil yaitu:
 - a. Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia; dan
 - b. Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5. Mempercepat penyelesaian legislasi primer, dengan cara mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
6. Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah, yang dilakukan dengan strategi:
 - a. Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir; dan
 - b. Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah.
7. Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal dengan cara mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan *smart services*, dan inovasi perencanaan penganggaran.

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, sejalan dengan arah kebijakan yang dilaksanakan pemerintah di tingkat provinsi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan yang diambil diantaranya yaitu:

1. Penguatan pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Penguatan ketersediaan data dan informasi sektoral melalui keterbukaan informasi publik.
3. Penguatan persandian dan keamanan informasi.
4. Penguatan pengelolaan kualitas penyebaran dan pemerataan informasi publik.

Adapun kegiatan dalam Renja Dinas Komunikasi Informatika Tahun 2023 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut:

Tabel 3.1. Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2023

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab Klaten	Program/ Kegiatan Renja 2023
1) Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan public 2) Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan 3) Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital 4) Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan 5) Mempercepat penyelesaian legislasi primer 6) Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah 7) Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal dengan cara mendorong inovasi dalam manajemen internal	1) Penguatan pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. 2) Penguatan ketersediaan data dan informasi sektoral melalui keterbukaan informasi publik. 3) Penguatan persandian dan keamanan informasi. 4) Penguatan pengelolaan kualitas penyebaran dan pemerataan informasi publik.	1)Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan; 2)Terwujudnya keamanan informasi pemerintah daerah; dan 3)Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah.	Program kegiatan yang diprioritaskan pada; 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2) Pengelolaan Aplikasi InformatikaPenyediaan layanan keamanan informasi 3) Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 4) Penyelenggaraan Statistik Sektoral

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Klaten sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten menetapkan tujuan dan sasaran Renja SKPD sebagai berikut:

1. Tujuan
- Meningkatkan penyelenggaraan komunikasi dan penyediaan informasi dengan pemanfaatan teknologi menuju Klaten Smartcity.
2. Sasaran
- a. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan

b. Terwujudnya keamanan informasi pemerintah daerah

c. Meningkatkan ketersediaan data pada portal satu data daerah

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 3) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Mebel
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Informasi dan Komunikasi Publik

A. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

- 2) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- 3) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- 4) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- 5) Pelayanan Informasi Publik
- 6) Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- 7) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- 8) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

III. Program Aplikasi Informatika

A. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

B. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- 2) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 3) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- 4) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

A. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

V. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

A. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- 2) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program kerja dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Tahun 2023 dan perkiraan maju Tahun 2024 disertai target kinerja dan pendanaannya dituangkan ke dalam Lampiran II.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman dasar dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten mempunyai peranan penting dalam penyediaan layanan internet bagi seluruh OPD di Kabupaten Klaten untuk menunjang kelancaran operasional pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan yang profesional dan berkualitas terhadap masyarakat menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Klaten, sehingga dibutuhkan konsistensi dan dukungan dana yang memadai untuk memberikan layanan internet di seluruh wilayah Kabupaten Klaten.

Agar pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 tidak hanya memuat program-program dalam rangka kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi, maka setiap Perangkat Daerah wajib mensinkronkan dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika.

Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun atas partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum konsultasi publik untuk menghasilkan kesepakatan

terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penjelasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda pembangunan daerah. Dengan pokok-pokok rencana, sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan mendukung tema RKPD Tahun 2023 ***“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkelanjutan”***.
2. Proyeksi rencana belanja daerah sebesar Rp. 13.021.539.000,- (Tiga Belas Milyar Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) untuk membiayai 5 program dengan 12 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019.

Dokumen Rencana Kerja ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten Tahun 2023. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini diharapkan mampu sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi daerah yakni: ***Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.***

Klaten, Juli 2022

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KLATEN



Drs. AMIN MUSTOFA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661115 199710 1 001

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)*
Provinsi/Kabupaten/Kota: Jawa Tengah/Klaten/Klaten

a Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan (Renja tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Urusan Wajib									
	Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen					100 Persen		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun	100 Persen					100 Persen		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas Kominfo	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP tersusun	4 Dokumen		0	0	0	4 Dokumen		
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen		0	0	0	2 Dokumen		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen					100 Persen		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	27 Orang		12 Bulan	12 Bulan	100%	27 Orang		
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honor KPA, PPTK, PPK SKPD, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara	12 Bulan		60 Kali	20 Kali	33%	12 Bulan		

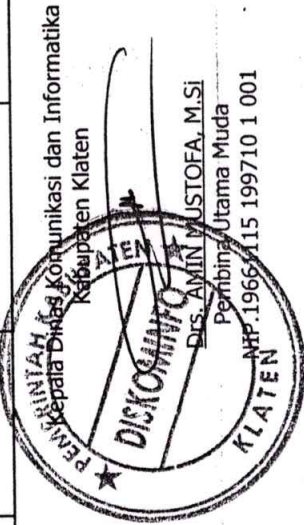
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD tersusun	18 Dokumen		0	0	0	18 Dokumen		
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang tersusun	2 Dokumen		0	0	0	2 Dokumen		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	100 Persen					100 Persen		
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang - undangan	168 Kegiatan		29 Kegiatan	29 Kegiatan	100%	28 Kegiatan		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 Persen					100 Persen		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	95 Unit		a. 1500 Buah b. 25 Jenis c. 1 Jenis	a. 1486 Buah b. 25 Jenis c. 1 Jenis	a. 99% b. 100% c. 100%	15 Unit		
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	80 Eksemplar		4 Jenis	4 Jenis	100%	10 Eksemplar		
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	355 Kali		250 Paket	200 Paket	80%	50 Kali		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	575 Kali		50 Kali	50 Kali	100%	100 Kali		
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	100 Persen					100 Persen		
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	131 Unit		11 Unit	11 Unit	100%	10 Unit		
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	140 Unit		9 Unit	9 Unit	100%	10 Unit		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu	100 Persen					100 Persen		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	8250 Eksemplar		2800 Surat	2161 Surat	77%	1500 Eksemplar		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 Bulan		0	0	0	12 Bulan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja, hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	5 Orang		a. 4 Orang b. 14 Jenis c. 4 Jenis	a. 4 Orang b. 14 Jenis c. 4 Jenis	a. 100% b. 100% c. 100%	4 Orang		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu	100 Persen					100 Persen		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	20 Unit		15 Unit	15 Unit	100%	14 Unit		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya terhabilitasi/terpelihara	2 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya terhabilitasi/terpelihara	105 Unit		12 Unit	12 Unit	100%	15 Unit		
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Terkai Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Disampaikan Ke Masyarakat	100 Persen					100 Persen		
		Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan	100 Persen					18.18 Persen		
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Publik Yang Disampaikan Kepada Masyarakat	100 Persen					100 Persen		
	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah kebijakan yang dirumuskan	16 Kebijakan		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Kebijakan		
	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah layanan aduan yang tertangani	550 Layanan Aduan		120 Aduan	120 Aduan	100%	100 Layanan Aduan		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah pemberitaan daerah	1400 Berita		75 Score	89 Score	118%	240 Berita		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media yang dikelola	10 Media		0	0	0	2 Media		
		Jumlah badan publik kategori			0	0	0	3 Badan Publik		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah kemitraan dengan pemangku kepentingan	2 Organisasi		a. 238 Menara b. 85 Titik c. 1 Dokumen d. 1 Tahun e. 1 Tahun	a. 238 Menara b. 85 Titik c. 0 Dokumen d. 1 Tahun e. 1 Tahun	a. 100% b. 100% c. 0 d. 100% e. 100%	2 Organisasi		
		Jumlah desa blank spot yang mendapatkan layanan telekomunikasi	206 Desa		100 Orang	50 Orang	50%	6 Desa		
		Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media massa dan papan ruang	950 Informasi		a. 100 Orang/Berita b. 22 Kelompok	a. 100 Orang/Berita b. 19 Kelompok	a. 100% b. 86%	170 Informasi		
		Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	100 Persen					62.96 Persen		
		Persentase Penambahan Akses Internet Di Ruang Publik	100 Persen					67.50 Persen		
		Persentase Penambahan Akses (Titik) Internet Di OPD Yang Disediakan Dinas Kominfo	74.51 Persen					58.82 Persen		
		Persentase Perangkat Daerah Yang Terkoneksi Di Jaringan Intra Pemerintah Atau Menggunakan Akses Internet Yang Diamankan Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	100 Persen					100 Persen		
		Jumlah OPD terlayani sistem jaringan intra pemerintah daerah	51 OPD		160 Lokasi	160 Lokasi	100%	51 OPD		
		Jumlah titik wifi di ruang publik yang terpasang	15 Titik					2 Titik		
		Persentase Layanan Publik Dan Administrasi Pemerintahan Yang Tercantum Dalam Dokumen Proses Bisnis Yang Telah Diimplementasikan Secara Elektronik (Layanan SPBE)	80 Persen					60 Persen		
		Jumlah OPD yang terintegrasi datanya dengan sistem pusat data	26 OPD		0	0	0	5 OPD		

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	28 Layanan		50 Sistem	62 Sistem	124%	16 Layanan		
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah kegiatan koordinasi persiapan evaluasi penilaian smart city	8 Kegiatan		0	0	0	8 Kegiatan		
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	1 Dokumen		0	0	0			
			150 Orang		0	0	0	20 Orang		
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Statistik Sektoral Yang Memiliki Standar Data Dan Metadata Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	70 Persen					30 Persen		
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Sektoral	75 Persen					75 Persen		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral	146 Data		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	136 Data		
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah produsen data statistik sektoral	46 OPD		0	0	0	38 OPD		
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi (E-Sign/Tanda Tangan Elektronik) Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	41 Persen					29.41 Persen		
		Persentase Sistem Informasi Perangkat Daerah Yang Diamankan Dengan Sertifikat Elektronik	68.63 Persen					35 Persen	-	
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Diamankan	45 Persen					25 Persen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	2600 Informasi		2 Kali	2 Kali	100%	500 Informasi		
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	9 Layanan		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	5 Layanan		

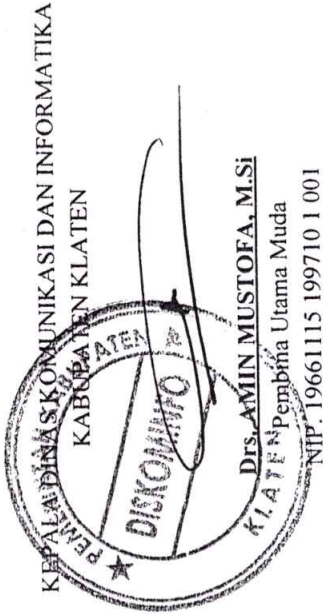


Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika
Provinsi/Kabupaten/Kota: Jawa Tengah/Klaten/Klaten

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	12	13			
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	-	-	56.5	59.5	63		67.6	32						
2	Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	-	-	-	75	77		-	0						
3	Tingkat Keamanan Informasi	-	-	-	60	68		-	58						
4	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	-	-	-	30	40		-	5						

Nb : Realisasi capaian tahun 2022 bersumber pada realisasi capaian semester I



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	2 Dokumen	100 %	5,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	15,000,000		
2	16	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											1,020,270,453		2,500,000,000
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan di bidang cukai di Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	10000 Orang	100 %	1,020,270,453	DBH CHT	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	2,500,000,000		
2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											185,999,000		380,000,000
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tersedianya administrasi Umum Perangkat Daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	15 paket	100 %	38,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	100,000,000		
2	16	01	2.06	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Tersedianya administrasi Umum Perangkat Daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	15 Paket	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	50,000,000		
2	16	01	2.06	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya administrasi Umum Perangkat Daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	10 Laporan	100 %	39,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	80,000,000		
2	16	01	2.06	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya administrasi Umum Perangkat Daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	24 Laporan	100 %	87,749,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	150,000,000		
2	16	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											134,250,000		454,912,000
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah paket Mebel yang disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	2 Unit	100 %	91,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	179,912,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
2 16 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang usuran pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	10 Unit	100 %		42,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah									105,500,000	
2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang usuran pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang usuran Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	12 Laporan	100 %		4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang usuran pemerintahan daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang usuran Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	12 Laporan	100 %		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang usuran pemerintahan daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang usuran Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	12 Laporan	100 %		71,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah									390,830,000	
2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang usuran pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	22 Unit	100 %		285,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang usuran pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	2 Unit	100 %		44,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 16 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang usuran pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	20 Unit	100 %		60,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									3,981,850,000	
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									3,981,850,000	
										1,902,084,000	
										1,902,084,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Unsur/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Praktikan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2 16 02 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disampaikan ke masyarakat Presentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 36.36 %	2 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.00 % 36.36 %		25,000,000
2 16 02 2.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase Informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disampaikan ke masyarakat Presentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 36.36 %	1 Dokumen 0 Dokumen	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.00 % 36.36 %		85,000,000
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase Informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disampaikan ke masyarakat Presentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 36.36 %	1 Dokumen	100 %	447,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.00 % 36.36 %		500,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Informasi terkait program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disampaikan ke masyarakat Presentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terkelolanya Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 36.36 %	1 Dokumen	100 %		Persentase Informasi terkait program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disampaikan ke masyarakat Presentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	100.00 % 36.36 %	300,000,000
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Informasi terkait program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disampaikan ke masyarakat Presentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Terkelolanya Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 36.36 %	1 Dokumen	100 %		Persentase Informasi terkait program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disampaikan ke masyarakat Presentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	100.00 % 36.36 %	100,000,000
2 16 02 2.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase Informasi terkait program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disampaikan ke masyarakat Presentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terkelolanya Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 36.36 %	2 Dokumen	100 %		Persentase Informasi terkait program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disampaikan ke masyarakat Presentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	100.00 % 36.36 %	250,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur		Target	
2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase Informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disampaikan ke masyarakat Presentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat kapasitasnya	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 36.36 %	50 Orang	100 %	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100.00 % 36.36 %	240,000,000			
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase Informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disampaikan ke masyarakat Presentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 36.36 %	1 Dokumen	100 %	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100.00 % 36.36 %	402,084,000			
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA												8,102,172,000		
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												3,923,023,410	6,402,172,000	
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terkelolanya nama domain dan sub domain di lingkup pemerintah Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.22 % 75 % 62.75 %	69 Unit	100 %	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase penambahan akses internet di ruang publik Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo	72.22 % 75 % 62.75 %	6,402,172,000		
2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												1,700,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase penambahan akses internet di ruang publik Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola	Terkelolanya e-government di Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.22 % 75 % 62.75 %	1 Unit	100 %	34,124,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase penambahan akses internet di ruang publik Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo	72.22 % 75 % 62.75 %	600,000,000
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase penambahan akses internet di ruang publik Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	Terkelolanya e-government di Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.22 % 75 % 62.75 %	12 Unit	100 %	397,106,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase penambahan akses internet di ruang publik Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo	72.22 % 75 % 62.75 %	600,000,000
2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase penambahan akses internet di ruang publik Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Terkelolanya e-government di Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.22 % 75 % 62.75 %	1 Dokumen	100 %	77,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase penambahan akses internet di ruang publik Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo	72.22 % 75 % 62.75 %	250,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terselenggaranya e-government di Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.22 % 75 % 62.75 %	1 Dokumen	100 %		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	
		Persentase penambahan akses internet di ruang publik								Persentase penambahan akses internet di ruang publik	72.22 % 75 % 62.75 %
		Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo								Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo	
2 20 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										296,429,000
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL										296,429,000
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										296,429,000
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik Sektoral	Terselenggaranya statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.00 %	1 Dokumen	100 %		Persentase ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	40.00 %
2 20 02 2.01 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	Terselenggaranya statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.00 %	50 Orang	100 %		Persentase ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	40.00 %
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										247,024,000
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI										247,024,000
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										247,024,000
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi (e-sign/tanda tangan elektronik) dalam komunikasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.22 % 38.00 %	12 Laporan	100 %		Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi (e-sign/tanda tangan elektronik) dalam komunikasi Perangkat Daerah	39.22 % 38.00 %
		Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik								Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik	167,024,000

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0060 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
Kode	Unsur/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cabatan Penting	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
2 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi (e-sign/tanda tangan elektronik) dalam komunikasi Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.22 % 38.00 %	6 Perangkat Daerah	100 %		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	39.22 % 38.00 %	80,000,000	
												18,440,121,000	
TOTAL									13,216,314,000				